

BAB I

PENDAHULUAN

Penulis memilih judul tersebut karena saat ini Indonesia merupakan Negara besar, yang memiliki banyak kerja sama dengan Negara lain di bidang ekonomi, sosial dan politik. Kerja sama tersebut saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kestabilan politik di Indonesia.

Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan setelah tergabung dalam organisasi perdagangan diiringi dengan keadaan politik yang cukup stabil. Salah satu alasan Indonesia bergabung adalah persaingan dengan Negara lain yang justru mendominasi pasar di dalam negeri, sehingga membuat produk lokal kalah dalam mempertahankan daya saing. Kondisi tersebut membuat Indonesia seolah menjadi negara yang ketergantungan dengan produk asing dan tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi pasar di dalam dan luar negeri, bahkan mayoritasnya sebagai konsumen, belum mampu menjadi produsen.

Perdagangan bebas dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri, salah satunya dengan adanya ekspor dan impor. Setelah perdagangan bebas menjadi kesepakatan bersama, Indonesia menjalin kerja sama internasional untuk memenuhi tujuan utamanya yaitu kepentingan dalam negerinya. Beberapa negara di Afrika termasuk Afrika Selatan menjadi negara tujuan ekspor terbesar

produk Indonesia.¹ Setelah mengetahui bahwa ekspor Indonesia yang berasal dari produk perusahaan-perusahaan dan Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) banyak diminati oleh Afrika Selatan, pemerintah semakin gencar dalam mendorong pengusaha dalam negeri untuk memanfaatkan peluang ini.

Oleh karena itu, hubungan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menjalankan politiknya dengan mendominasi pasar di Afrika Selatan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan memiliki indeks yang semakin baik selama periode 2010-2014, di tengah situasi global yang tidak kondusif.² Kondisi tersebut membuat posisi Indonesia saat ini dianggap sangat penting, terutama dalam percaturan perdagangan internasional. Namun, kondisi yang dihadirkan dalam Hubungan Internasional menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer saja. Sedangkan kondisi ekonomi berada di urutan belakang dan tidak terlalu diperhatikan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab ekonomi suatu negara lemah, yaitu karena terlalu fokus terhadap kondisi politiknya dan cenderung mengabaikan pertumbuhannya. Sebaliknya, negara yang terlalu fokus terhadap ekonomi saja dan tidak memperhatikan stabilitas politik membuat hubungan diplomasi dengan negara lain menjadi buruk dan justru membuat ekonomi menjadi lemah.

¹ Kemenperin, 30 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Untuk Produk Hasil Industri, <http://www.bappenas.go.id> diakses pada 9 Maret 2015

² Bappenas, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN, <http://www.bappenas.go.id> diakses pada 9 Maret 2015

Pada dasarnya, interaksi utama antar pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi. Naik dan turunnya ekonomi suatu negara hanya salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi kestabilan politik di dalam negeri. Politik tidak cukup bila membahas politik tanpa mempelajari ekonomi; dan tidak lengkap apabila membahas ekonomi tanpa mempelajari kondisi politik.³ Pada konteks ini, ekonomi-politik merupakan indikasi kemandirian suatu negara, sehingga pemerintah berkewajiban untuk membuat kebijakan yang seimbang, agar stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga, tidak terkecuali Indonesia.

Keberadaan rezim internasional muncul sebagai dampak globalisasi yang diperlukan dalam mengelola hubungan antar negara, misalnya mengatur perdagangan internasional. Rezim internasional dapat dipahami sebagai sebuah alat untuk memfasilitasi pembuatan kesepakatan yang bersifat substantif dalam dunia politik dengan ruang lingkup lintas negara.⁴ Rezim memfasilitasi kesepakatan melalui penyediaan norma, prinsip, aturan dan prosedur pengambilan keputusan implisit maupun eksplisit. Rezim diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dan bertujuan untuk membantu menghadapi hambatan serta halangan dalam proses hubungan internasional. Hadirnya rezim di dunia internasional, menjadi jembatan antarnegara untuk saling terhubung dan berkomunikasi.

³ Mohtar Mas' oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 halaman 9

⁴ L. E Prastika, Konferensi Asia Afrika dan Peningkatan Peran Republik Indonesia di Dunia, <http://louis-embun-fisip13.web.unair.ac.id/>, diakses pada 11 Maret 2015

Bergabungnya Indonesia dalam berbagai kerja samadan rezim internasional dengan negara lain semakin bertambah. *World Trade Organization* (WTO) berdiri sebagai rezim perdagangan internasional, yang membuat negara anggota di dunia, termasuk Indonesia, meluaskan jangkauannya dalam ekspor dan impor barang. Persetujuan yang dibuat merupakan kontrak antar negara yang mengikat pemerintah untuk mematuhi seluruh peraturan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Rezim perdagangan internasional yang diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah WTO. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1955, yang diawali sejak tahun 1948 melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu agenda perdagangan terkait dengan rezim internasional yaitu Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di tahun 1955.⁵

Hal ini merupakan bukti bahwa Indonesia belum menjalankan prioritas utama yaitu kepentingan nasional dan lebih mementingkan perdagangan Internasional dahulu melalui ekspor dan impor antar negara. Meskipun bukan prioritas nomor satu, namun potensi yang lebih menjanjikan terlihat sangat jelas didepan mata dan terbuka luas, yaitu kerja sama Internasional dalam bidang perdagangan dengan bentuk hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan salah satu kerja sama yang mengawali kegiatan di antara kedua negara yang berpengaruh dalam hubungan internasional. Salah satu hubungan bilateral yang mengalami perkembangan ekonomi-politik Indonesia semakin pesat adalah kerja sama perdagangan

⁵ Karlina W.K., Perubahan Pada Rezim Perdagangan Dunia, *karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id*, diakses pada 10 November 2015

internasional dengan Afrika Selatan. Kerja samaini berlangsung setelah tumbangnya apartheid dan disusul dengan demokratisasi, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang besar di Afrika Selatan.⁶ Selain itu, kerja sama bilateral menjadi jalan bagi Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan pilar utama dalam mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. Kepentingan tersebut yang mendorong negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam membentuk kerja sama.

“Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu segala sesuatu yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian, bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan atau kerja sama.”⁷

Untuk mengendalikan negara lain, suatu negara harus memiliki kekuatan di bidang politik, maupun ekonomi. Dengan begitu, negara dapat mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi secara bersamaan. Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi guna memenuhi kepentingan politik. Dengan pengetahuan tersebut dapat mengetahui ide politik negara yang bekerja sama. Selain kerja sama, dukungan internasional dibutuhkan untuk menunjukkan keeksistensiannya dan citra suatu negara di dunia, agar kebijakan yang dibuat mendapatkan dukungan dari negara-negara dengan pemikiran yang relatif sama.

⁶ Kemlu, Seminar Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara-negara Sub Sahara dan Uni Afrika, www.kemlu.go.id diakses pada 11 Maret 2015

⁷ Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990 halaman 140

Dengan adanya pengetahuan politik yang diperoleh dari negara lain, Indonesia akan dapat memahami politik luar negeri yang sedang dijalankan oleh mitra kerjanya. Sehingga Indonesia dapat mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dan berdiplomasi secara baik di lingkup internasional.

Wakil Menteri Perdagangan menyatakan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan mengalami peningkatan dari USD 484,528 juta pada tahun 2009 menjadi USD 680,662 juta di tahun 2010.⁸ Duta Republik Indonesia untuk Afrika Selatan menambahkan bahwa pasar Afrika Selatan potensial sebagai pintu masuk kegiatan ekspor dan jasa Indonesia ke pasar-pasar lainnya di kawasan Afrika, yakni melalui kerja sama perdagangan bebas.⁹ Afrika Selatan memiliki jumlah penduduk cukup besar, sebanyak 54 juta jiwa dengan daya beli yang cukup tinggi terhadap produk-produk Indonesia.¹⁰ Respon positif tersebut mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan memperbanyak kuantitas produk agar mampu mendominasi pasar Afrika Selatan sehingga dapat memenuhi kepentingan Indonesia di kawasan negara Afrika yang lain dan Eropa.

Penduduk Afrika Selatan memiliki daya beli tinggi terhadap barang impor, yang beberapa diantaranya berasal dari Indonesia. Meskipun saat ini beberapa produk Indonesia sudah tidak laku di pasar domestik, di Afrika Selatan justru digemari dan

⁸ BUMN, Pasar Afrika Selatan Jadi Sasaran Ekspor, www.bumn.go.id/ptpn12/berita/1947 diakses pada 9 November 2015

⁹ BUMN, Afsel, Pasar Potensial Komoditas Perkebunan, www.bumn.go.id/ptpn12/berita/2366 diakses pada 9 November 2015

¹⁰ Kemendag, Buka Akses ke Pasar Non-Tradisional, Wamendag Pimpin Misi Dagang ke Afrika Selatan, <http://kemendag.go.id> diakses pada 2 April 2015

menjadi produk utama. Hal tersebut merupakan kesempatan untuk mendominasi pasar, mengingat kebutuhan Afrika Selatan akan produk Indonesia semakin besar. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustaman menyatakan bahwa pasar Afrika Selatan memberikan harapan kepada Indonesia untuk meningkatkan ekspor, bukan lagi bergantung pada Amerika dan Eropa.¹¹ Apabila kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Afrika Selatan dapat dijadikan mitra ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Sehingga kepentingan Indonesia untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan demi kesejahteraan umum dengan cara menguasai pasar Afrika Selatan dapat tercapai. Kerja sama yang baik tersebut juga dapat dijadikan sebagai sumber motivasi untuk meningkatkan hubungan diplomasi di bidang lain.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekspor ke pasar Afrika Selatan pada tahun 2010-2014?

C. Landasan Teoritik

1. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin.¹² Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan skema untuk mencapai

¹¹ Tempo.Co., Genjot Ekspor, Pemerintah Bidik Afrika Selatan, <http://m.tempo.co/read/news/2012/12/12/090447761> diakses pada 10 November 2015

¹² Binus, Pengertian Strategi, library.binus.ac.id diakses pada 11 Maret 2015

sasaran yang dituju. Strategi didasarkan pada asumsi bahwa perilaku para pembuat keputusan politik luar negeri adalah rasional, yaitu bahwa pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas.¹³ Pertimbangan tersebut berguna sebagai langkah awal pembuatan kebijakan yang tepat sebelum bertindak.

Indonesia memiliki pertimbangan tatanan politik dalam negeri, yang menjadi salah satu faktor domestik dalam perumusan strategi politik luar negeri Republik Indonesia.¹⁴ Di dalam politik luar negeri, terdapat strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai peluang dalam memperlebar volume perdagangan di Afrika Selatan. Peluang ini berupa keuntungan yang didapat apabila menjalin kerja sama internasional berupa hubungan diplomatik, ditunjukkan dengan keaktifan Indonesia pada forum-forum perdagangan internasional untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dalam negeri. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi negara adalah keterbukaan dan agresifitas Indonesia terhadap forum kerja sama perdagangan Internasional, seperti *Free Trade Area* (FTA) atau perdagangan bebas.

Kegiatan Indonesia di forum kerja sama berfungsi sebagai media untuk diplomasi dan komunikasi secara internasional dengan memperkenalkan produk

¹³ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional "Tingkat Analisis dan TEORISASI"*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989 halaman 90

¹⁴ Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia "Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional"*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011 halaman 111

secara intensif. Komunikasi internasional memiliki tujuan agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik terhadap citra positif suatu negara. Selain itu, citra positif merupakan gambaran suatu negara yang dapat dilihat dari kestabilan ekonomi-politik negara tersebut serta kepatuhan terhadap peraturan dan hubungan baik dengan negara lain. Meskipun memiliki prinsip yang berbeda, suatu negara akan tetap mempertahankan kerjasamanya apabila citra negara tersebut dinilai baik. Penilaian tersebut dapat dilihat dari keaktifan Indonesia di berbagai rezim internasional secara intensif, yang mampu menjembatani perbedaan dan justru menumbuhkan minat untuk bertukar informasi politik, ekonomi, teknologi dan budaya. Dengan adanya rezim internasional dan kegiatan yang diselenggarakan, Indonesia dan negara-negara di dunia mendapatkan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional.

2. Rezim Internasional

Rezim adalah perilaku internasional yang terinstitusi yang didalamnya terdapat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit. Dari hal-hal tersebut diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional.¹⁵ Rezim Internasional berperan sebagai wadah untuk mengatur aktor-aktor Hubungan Internasional, yang dapat menghasilkan kerja sama antara negara-negara anggotanya. Pada rezim

¹⁵ Rizka Meilinda, Rezim-rezim Internasional, *rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id* diakses pada 12 Desember 2015

internasional, terdapat hubungan timbal-balik yang diterapkan agar negara-negara yang bekerja sama saling mendapat keuntungan.

Pada tahun-tahun terakhir, hubungan timbal-balik dalam rezim internasional menjadi strategi politik global sebagai sebuah nilai yang sepenuhnya positif.¹⁶ Dengan adanya prinsip ini, masing-masing Negara dapat menganalisa keuntungan dan kerugian yang didapat apabila kerja sama tersebut terlaksana. Kesiapan tersebut dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan tercapainya suatu kerja sama.

Secara umum, hubungan timbal-balik digunakan sebagai kajian global dalam hubungan ekonomi-politik antar negara yang tertuang dalam prinsip WTO. Dengan konsep tersebut, Indonesia akan mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat pada dua negara apabila memulai suatu kerja sama bilateral. Seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan yang bekerja sama dalam bidang ekspor dan impor. Terlaksananya kerja sama tersebut bukan hanya Indonesia saja yang ingin mendapatkan keuntungan dari ekspor-impor untuk memenuhi kepentingannya. Namun, Afrika Selatan juga menginginkan hal yang sama yaitu mendapatkan keuntungan dari ekspor-impor sebagai sumber devisa negara. Apabila Indonesia ekspor-impor ke dan dari Afrika Selatan, maka Indonesia juga harus bersedia melakukan hal yang sama yaitu menerima produk ekspor dan impor produk Afrika Selatan. Dengan begitu, kedua negara mendapatkan hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan. Untuk

¹⁶ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional "Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia"*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 halaman 229

membatasi kepentingan masing-masing negara, WTO menerapkan beberapa prinsip agar negara anggota yang bekerja sama saling mendapatkan keuntungan.

Keempat prinsip WTO harus ditaati oleh setiap negara yang ingin menjalankan hubungan bilateral dalam perdagangan internasional. Adapun prinsip WTO diantaranya :¹⁷

- a) Non-diskriminasi yang memiliki dua komponen bahwa anggota WTO harus menerapkan kondisi yang sama pada perdagangan dengan negara anggota lainnya dan barang ekspor-impor harus diperlakukan sama dengan barang produksi dalam negeri.
- b) *Transparency* dengan cara mempublikasikan peraturan perdagangan mereka sehingga dapat ditinjau oleh WTO, dan
- c) *Safety Valves* dengan maksud membatasi perdagangan. WTO mengizinkan anggota untuk mengambil langkah-langkah proteksi. Sedangkan pemerintah memiliki hak untuk bertindak ketika kompetisi semakin kuat dan menekan pesaing domestik. Selain itu, pemerintah dapat memastikan persaingan berjalan sehat dan dapat menentukan bea impor yang disubsidi dan *anti dumping* serta ketentuan untuk intervensi sebagai alasan ekonomi.

¹⁷ Yolanda Rizka, Kelembagaan Perdagangan Internasional, yolanda-rizka-fisip11.web.unair.ac.id/artikel diakses pada 13 November 2015

- d) *Reciprocity* mencerminkan keinginan untuk membatasi penyalahgunaan yang timbul karena non-diskriminasi dan untuk menghindari adanya *free-rider*. Koneksi timbal-balik memastikan bahwa perdagangan saling menguntungkan akan terwujud.
- e) *Binding and Enforceable Commitments*. Merupakan komitmen tarif yang dibuat oleh anggota WTO dalam negosiasi perdagangan multilateral. Suatu negara dapat mengubah perjanjian, namun hanya setelah bernegosiasi dengan negara mitra dagang, yang bisa berarti mendapatkan konsekuensi. Jika negosiasi tidak berhasil, negara dapat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa WTO.

Prinsip-prinsip WTO tersebut merupakan wujud dari pasar bebas, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perdagangan dunia. Adanya prinsip tersebut, negara yang tergabung dengan rezim internasional WTO akan mematuhi segala peraturan yang telah disepakati. Peraturan yang ditetapkan merupakan proses berjalannya ekonomi yaitu berupa perdagangan internasional dan sisi politiknya adalah kebijakan yang diterapkan. Kebijakan tersebut berupa pengurangan hambatan-hambatan perdagangan yang membatasi proses ekspor-impor antar negara. Dengan begitu negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia, dapat menggunakan prinsip-prinsip rezim internasional tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

D. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas, strategi Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekspor ke pasar Afrika Selatan pada tahun 2010-2014, yaitu : Memanfaatkan rezim internasional WTO sebagai payung perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan di bidang ekspor dan impor.

E. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema. Penulis melakukan penelitian yang ruang lingkungnya terbatas, mudah dipahami serta mendapatkan data yang akurasinya lebih tinggi. Adapun penjelasan sejarah singkat, merupakan bahasan yang digunakan untuk memperjelas topik selanjutnya.

Dalam rangka merevitalisasi hubungan antara RI dan Afrika Selatan, KBRI telah aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran dagang internasional dan pameran wisata di Afrika Selatan sepanjang tahun 2010. Kerja sama pertahanan mencatat perkembangan penting selama 2010 dengan terjadinya peningkatan saling mengunjungi pejabat kedua negara untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah disepakati. Termasuk pengadaan dan pengembangan peralatan militer. Bidang-bidang kerja sama lainnya yang juga mencatat perkembangan nyata pada tahun 2010 antara

lain kerja sama ekonomi, kebudayaan dan riset.¹⁸ Volume perdagangan kedua negara tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan komoditi ekspor utama ke Afrika Selatan. Produk yang dipasarkan antara lain, hasil olahan kelapa sawit, *furniture, textile*, dan kerajinan tangan.¹⁹ Selain itu, penulis menjelaskan tiga dari lima prinsip WTO diatas sebagai analisa berpikir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa strategi Indonesia memanfaatkan peluang ekspor pada tahun 2010-2014 ke pasar Afrika Selatan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis memahami dan menjelaskan kebijakan yang terkait dengan data-data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah simpulan.

Adapun angka-angka yang tertulis merupakan data statistik sebagai sumber data akurat yang diperlukan. Data statistik tersebut merupakan cara untuk mengarahkan pada kejadian, kondisi dan peristiwa yang sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁸ Kemlu, Seminar Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara-negara Sub Sahara dan Uni Afrika, www.kemlu.go.id/documents diakses pada 11 Maret 2015

¹⁹ Puskita, KKP Diversifikasi Pasar Ekspor ke Timur Tengah dan Afrika, <http://puskita.kkp.go.id> diakses pada 13 Agustus 2015

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Perantara yang digunakan penulis dengan cara mengutip dari sumber lain seperti Laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia, buku, jurnal, artikel dan sumber informasi yang menunjang seperti dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk pengayaan data ataupun perluasan materi, penulis menggunakan data yang diperoleh dari internet.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima Bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan bahasan dan materi yang diteliti.

Bab I merupakan Pendahuluan yang membahas tentang alasan pemilihan judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa, Batasan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan Ekonomi-Politik Internasional Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014 serta Peningkatan Peran dan Kemampuan Indonesia dalam Diplomasi Perdagangan Internasional. Kemudian penulis memaparkan Kondisi Hubungan Bilateral Indonesia-Afrika Selatan dalam Bidang Ekspor yang berjalan hingga saat ini.

Bab III membahas Pertumbuhan Afrika Selatan. Bab ini menjelaskan tentang Kondisi Geografis dan Sejarah Singkat Republik Afrika Selatan hingga mencapai kemerdekaan. Kemudian penulis menjelaskan Potensi Pasar Afrika Selatan dan Kebijakan Multi-Milyar Rand sebagai Fasilitas Manufaktur yang diluncurkan di Cape Town. Bagian dari sub bab dijelaskan dengan sudut pandang ekonomi politik internasional.

Bab IV menjelaskan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memanfaatkan Peluang Ekspor ke Pasar Afrika Selatan. Pada bab ini penulis menjelaskan langkah pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan Afrika Selatan yang disampaikan terbagi menjadi sub bab dengan penjelasan yang lebih detil. Adapun poin-poin yang dibahas dilengkapi dengan data yang akurat dan menjawab rumusan masalah. Kebijakan pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan rezim internasional WTO dengan cara menggunakan prinsip-prinsipnya dalam bekerja sama dengan Afrika Selatan.

Bab V merupakan Kesimpulan Strategi Indonesia Memanfaatkan Peluang Ekspor ke Afrika Selatan 2010-2014. Bab ini membahas mengenai inti dari bab dan sub bab yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai penutup. Bab yang dijelaskan sebelumnya berisi inti dari bab dan sub bab dijelaskan secara singkat dan jelas.